H. ABDUL HALIM MUSLIH
BUPATI BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

JOKO B PURNOMO
WAKIL BUPATI BANTUL

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka Bupati Kabupaten Bantul menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul (LPPD) Tahun 2020 dan menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2020.

RLPPD Tahun 2020 ini merupakan ikhtisar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun kelima dari lima tahun periode RPJMD.

1. Gambaran Umum Daerah

a. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 110º12'34"¬110º31'08" Bujur Timur dan 07º44'04" 08º00'27" Lintang Selatan. Kabupaten Bantul apabila dilihat dari bentang alamnya terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Bantul memiliki batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 km2 (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 kapanewon (kecamatan). Kapanewon Dlingo merupakan kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km2 (11,02%), sedangkan kapanewon dengan wilayah paling sempit adalah Kapanewon Srandakan yaitu 18,32 km2 (3,61%). Persentase luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar 1 dibawah ini

Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul

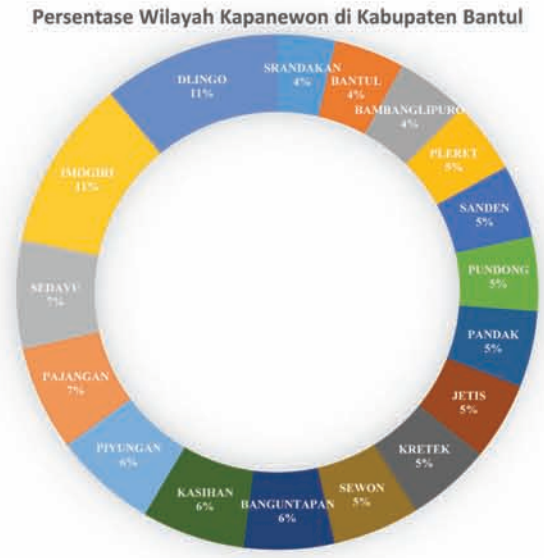

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 475.871 jiwa atau 49,84% dan penduduk Perempuan sebanyak 478.435 jiwa atau 50,16%. Gambaran tersebut terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020

No	Kapanewon	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Persen (%)
1	SRANDAKAN	15,475	15,607	31,082	3.26%
2	SANDEN	15,713	16,097	31,810	3.33%
3	KRETEK	15,076	15,688	30,764	3.22%
4	PUNDONG	17,587	18,079	35,666	3.74%
5	BAMBANGLIPURO	20,620	21,086	41,706	4.37%
6	PANDAK	26,118	25,918	52,036	5.45%
7	PAJANGAN	18,271	18,280	36,551	3.83%
8	BANTUL	32,146	32,506	64,652	6.77%
9	JETIS	29,237	29,394	58,631	6.14%
10	IMOGIRI	31,730	32,105	63,835	6.69%
11	DLINGO	19,872	20,126	39,998	4.19%
12	BANGUNTAPAN	56,476	56,822	113,298	11.87%
13	PLERET	24,430	24,067	48,497	5.08%
14	PIYUNGAN	26,320	26,542	52,862	5.54%
15	SEWON	50,539	50,024	100,563	10.53%
16	KASIHAN	52,215	52,384	104,599	10.96%
17	SEDAYU	24,046	24,110	48,156	5.04%
JUMLAH		475,871	478,835	954,706	
Persentase		49.84%	50.16%		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 272.771 jiwa atau 28.57%, sedangkan yang paling sedikit adalah Strata III yaitu sebesar 437 atau 0,046% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KAPANEWON	TINGKAT PENDIDIKAN										TOTAL
		BELUM / TIDAK SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD/ SEDERAJAT	TAMAT SMP/ SEDERAJAT	TAMAT SMA/ SEDERAJAT	DI/ DII	DIII/ SARJANA MUDA	D IV/ STRATA I	STRATA II	STRATA III	
1	SRANDAKAN	5,063	3,221	5,391	4,379	10,221	305	465	1,720	112	5	31,082
2	SANDEN	5,000	2,224	6,157	4,961	10,158	310	731	2,163	104	2	31,810
3	KRETEK	4,586	2,521	5,676	4,676	10,304	285	702	1,892	110	8	30,764
4	PUNDONG	6,515	2,630	8,417	5,625	10,154	227	544	1,482	68	4	35,666
5	BAMBANGLIPURO	7,760	2,858	7,811	6,022	13,320	372	825	2,453	169	6	41,706
6	PANDAK	9,951	3,803	12,541	7,732	14,241	305	914	2,397	146	9	52,036
7	PAJANGAN	7,308	3,587	8,346	6,536	9,690	205	483	1,295	95	6	36,351
8	BANTUL	11,828	4,975	10,740	8,749	20,485	566	1,838	5,015	428	24	64,652
9	JETIS	11,071	4,954	11,290	8,847	17,286	381	1,201	3,274	211	16	58,631
10	IMOGIRI	14,246	3,491	18,232	10,362	13,841	290	866	2,367	109	11	63,835
11	DLINGO	6,711	3,035	10,671	9,042	7,334	146	228	601	29	1	39,998
12	BANGUNTAPAN	20,683	10,494	16,410	15,102	31,788	974	3,759	12,456	1,480	152	113,298
13	PLERET	10,393	4,503	10,523	7,313	12,107	270	605	2,559	209	15	48,497
14	PIYUNGAN	10,617	4,497	8,667	7,281	16,905	379	1,062	3,183	259	12	52,862
15	SEWON	19,441	7,339	17,629	14,129	28,728	843	2,858	8,657	863	76	100,563
16	KASIHAN	18,762	8,249	16,649	14,927	32,209	734	2,720	9,277	1,005	67	104,599
17	SEDAYU	9,127	3,597	8,931	6,908	14,096	345	1,012	2,995	219	26	48,156
JUMLAH		181,062	75,978	184,283	142,613	272,771	6,937	21,123	63,886	5,616	437	954,706
PERSENTASE		18.97%	7.96%	19.30%	14.94%	28.57%	0.73%	2.21%	6.69%	0.59%	0.05%	100.00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021; Data agregat Kependudukan Semester II 2020, data diolah

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

a. Visi dan Misi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1) Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2) Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3) Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4) Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5) Nasionalisme yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6) Religius yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat;
4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana;
5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman, harmonis, dan bersatu serta berbudaya istimewa.

b. Prioritas Pembangunan

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut :

1) Pembangunan manusia dan pengentasan Kemiskinan
2) Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
3) Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah
4) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah
5) Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban
6) Pemantapan reformasi birokrasi

3. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional

Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80.01	80.01	0.00%
2.	Angka Kemiskinan	12.92	13.5	4.49%
3.	Angka Pengangguran	3.06	4.06	32.68%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5.53	0.49	-91.14%
5.	Pendapatan per Kapita			
	- Pendapatan per Kapita Nominal	Rp 27,78 juta	Rp 27,40 juta	-1.35%
	- Pendapatan per Kapita Riil	Rp 20,11 juta	Rp 19,73 juta	-1.88%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.448	0.381	-14.96%

Sumber : BPS, 2021; **)Angka sangat sementara-sumber Bappeda 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (growth oriented), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (people need oriented). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Pencapaian IPM Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 80,01 atau berada pada capaian sangat tinggi. Nilai ini sama dengan capaian IPM Kabupaten Bantul di tahun 2019. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan pada nilai Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masing-masing sebesar 0,09; 0,02; dan 0,01. Namun terjadi penurunan nilai pada Pengeluaran per Kapita sebesar Rp119.000,- pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat memberikan permasalahan serius yang berdampak kepada berbagai aspek mulai ekonomi, kesehatan bahkan sampai masalah kerawanan sosial. Pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan didaerah.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan sebesar 0,58 dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pelaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan persiapan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2021. Selain itu konsentrasi pada perbaikan data pada program :

1 Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD
2 Perbaikan NIK penerima Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah :

1 Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2 Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 4
Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020

NO	Nama Bantuan Sosial	Jumlah (KK)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Sosial (BST)	17.328	Kementerian Sosial RI
2	Sembako (BPNT)	106.419	Kementerian Sosial RI
3	Top Up DIY	36.858	APBD DIY
4	BLT APBD	5.340	APBD Bantul
5	BLT DD	17.886	APBDES

Sumber : Bappeda, 2021

Data dari penerima bantuan sosial merupakan data sasaran yang sudah melewati proses Musyawarah Desa (Musdes). Untuk pendampingan dan penyaluran Bansos dilakasanakan oleh semua lini dari tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa. Pendampingan dan distribusi dilaksanakan oleh pendamping TKPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa.

c. Angka Pengangguran

Pada tahun 2020, angka pengangguran Kabupaten Bantul sebesar 4,06% (sumber: BPS Sakernas 2020) sedangkan pada tahun 2019, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bantul adalah sebesar 3,06%. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori penganggur pada TPT meliputi:

1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,
4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukan nilai sebesar Rp.19,25 triliun sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukan nilai sebesar Rp.26,59 triliun.

Tabel 5 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

No.	Tahun	Harga Berlaku		Perubahan (%)	Harga Konstan		Perubahan (%)
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan	
1	2019	26,345,477.41	7.78	-88,17	19,154,769.08	5.53	-91,14
2	2020*)	26,588,571.54	0.92		19,248,827.17	0.49	

Sumber : Bappeda, 2021

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan 2020

Kategori	Uraian	2019**	2020*)	Perubahan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,13	8.54	6469,23
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,27	-8.69	3118,52
C	Industri Pengolahan	5,38	-2.54	-147,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,73	-4.65	-198,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,25	16.85	104,24
F	Konstruksi	5,17	-11.06	-313,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,19	-1.12	-121,58
H	Transportasi dan Pergudangan	6,46	-13.69	-311,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,68	-10.40	-219,82
J	Informasi dan Komunikasi	7,29	20.93	187,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,97	11.72	17,55
L	Real Estate	6,43	8.99	39,81
M,N	Jasa Perusahaan	7,38	-2.01	-127,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	-7.30	-313,45
P	Jasa Pendidikan	6,65	6.36	-4,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,02	16.80	139,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,09	-19.15	-414,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,53	0.49	-91,14

Sumber : Bappeda, 2021

e. Pendapatan per Kapita

Pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan. Pendapatan penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu ditunjukan oleh nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang menunjukan nilai PDRB per satu orang penduduk di suatu wilayah. Salah satu komponen dalam nilai tambah tersebut adalah upah dan gaji yang diterima masyarakat sebagai balas jasa tenaga kerja.

Pendapatan per kapita nominal pada tahun 2020 sebesar 27.40 juta rupiah dan pendapatan riil sebesar 19.73 juta rupiah. Pendapatan ini lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2019 sebesar 27,78 juta rupiah dan pendapatan riil sebesar 20,11 juta rupiah. Penurunan pendapatan per kapita ini dapat diasumsikan bahwa terjadi penurunan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Bantul sehingga daya beli masyarakat menurun.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 merencanakan pencapaian pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat pembangunan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat pendapatan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat adalah penghitungan gini rasio. Pada tahun 2019 Gini Ratio Kabupaten Bantul menyentuh angka 0,4280 atau menurun 0,02 poin (ketimpangan menurun) dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, menurun lagi sebesar 0,047 poin yaitu sebesar 0,3810. Berdasarkan kriteria Oshima, angka gini ratio di Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,4).

4. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga kelestarian lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengentaskan kemiskinan, mewujudkan tata pemerintah yang empatik, mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, melestarikan budaya, serta kebijakan lain yang pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment.

1). Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati terpilih yakni terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.

Pada tahun 2020, kinerja pemerintah Kabupaten Bantul pada urusan pendidikan relatif baik. Hal ini diperlihatkan dari tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, dan tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama yang nilainya masing-masing mencapai 93,91 %, 94,88% dan 98,35 %. Nilai ini tidak mencapai 100% dimungkinkan karena data peserta didik yang disajikan merupakan peserta didik yang terdata menempuh pendidikan di sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Bantul yang terekam dalam database Dapodik. Selisih data yang ada diperkirakan karena ada warga Kabupaten Bantul yang bersekolah di sekolah yang berada dalam wilayah kabupaten lain.